**ABSTRAK**

Desa adalah satuan pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini urusan kewenangan yang dimiliki oleh desa berupa hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik terutama dalam penerapan sistem keuangan desa maka, dalam Laporan Akhir ini penulis mengambil judul **“PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”** yang bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem keuangan desa, kendala dalam penerapan serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan penerapan Sistem keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan informan kepala dinas BPMPD Kab. Tanah Laut, kepala bidang pemerintahan desa, kepala desa serta kasi keuangan desa.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kendala dalam penerapan siskeudes di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berupa kurang berkompetennya perangkat pemerintah desa, akses transportasi yang cukup sulit untuk dijangkau, sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta adanya resistensi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: Sosialisasi, Pelatihan dan Evaluasi. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan perlu adanya optimalisasi dan perbaikan sistem pelatihan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa seperti: pelatihan dengan menggunakan sistem praktek, materi praktek yang modern, narasumber pelatihan yang professional dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten kepada tiap-tiap desa, agar lebih paham dan mengerti sehingga dalam penerapannya dapat berjalan dengan maksimal. Juga pemerintah hendaknya memperkirakan terlebih dahulu akan sarana dan prasarana dari setiap desa seperti: akses transportasi, kelengkapan ATK, serta sistem informasi yang dibutuhkan.